

BAB I

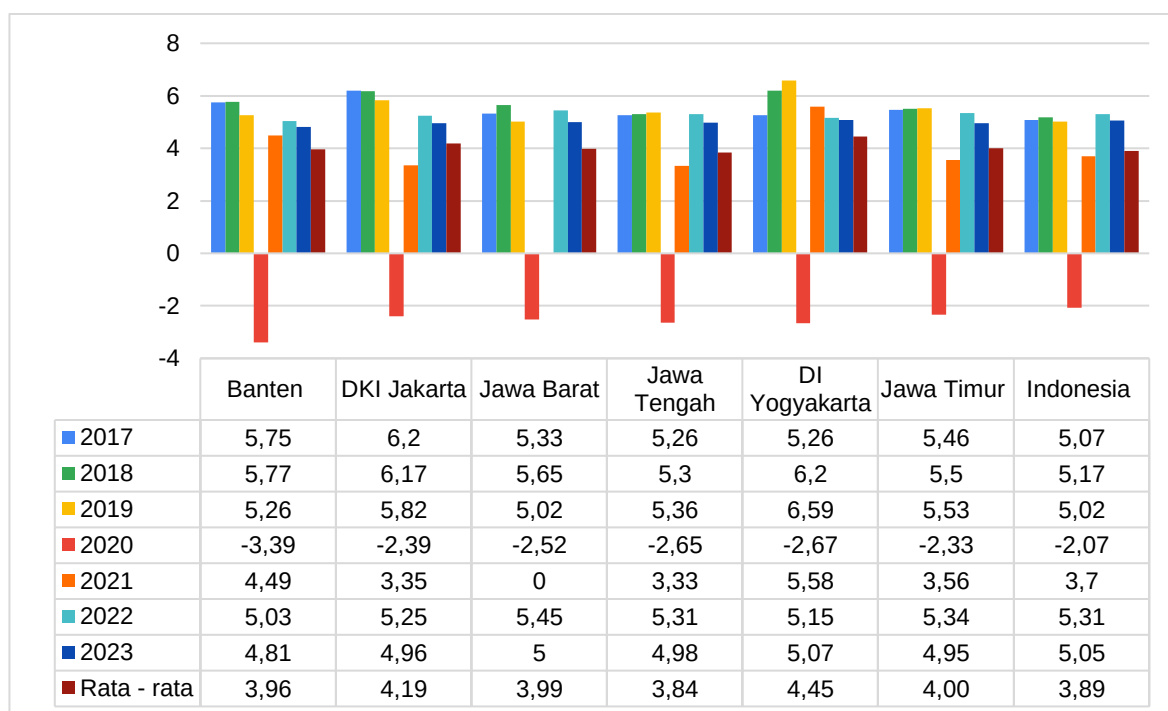
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator kunci dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan aktivitas yang menghasilkan peningkatan produksi barang dan jasa di masyarakat. Isu pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai persoalan perekonomian berkelanjutan (Jemumu & Damayanti, 2024). Oleh karena itu pada Provinsi Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian utama mengingat peran strategisnya sebagai salah satu pusat ekonomi nasional. Sebagai pusat ekonomi nasional meliputi industri, perdagangan, dan pertanian. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur menunjukkan tren yang dinamis dalam tahun 2017 – 2023.

Pengamatan terhadap tren dan variasi laju pertumbuhan ekonomi antarprovinsi di Pulau Jawa dapat memberikan gambaran awal mengenai tingkat pemerataan dan keinginan pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Ketidaksamaan dalam laju pertumbuhan antardaerah berpotensi mencerminkan adanya ketimpangan spasial, yang pada gilirannya menjadi isu strategis dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Upaya memahami dinamika pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur secara komprehensif, perlu dilakukan perbandingan dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa serta dengan pencapaian nasional. Hal ini bertujuan untuk memperoleh perspektif yang lebih luas mengenai posisi relatif Jawa Timur dalam struktur ekonomi regional enam Provinsi utama yang terletak di Pulau Jawa yakni, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten.

Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih lanjut pola-pola tersebut guna mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan antar wilayah. Berdasarkan gambar 1.1 bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi ini mengalami fluktuasi dari tahun 2017 hingga 2023.



Gambar 1.1 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Enam Provinsi Di Pulau Jawa dan Indonesia tahun 2017-2023 (Persen).

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur (*Data diolah*).

Tercatat pada tahun 2017 laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5.46%, kemudian meningkat menjadi 5.50% di 2018 lalu 5.53% pada tahun 2019. Di tahun 2020 terdapat dampak pandemi Covid-19, hal ini menyebabkan terjadinya penurunan laju pertumbuhan ekonomi sebesar -2.33%, dengan di ikuti pemulihan ekonomi sebesar 3.56% tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2022, laju pertumbuhan ekonomi naik menjadi 5.34%, sebelum mengalami penurunan ke 4.95% pada tahun 2023. Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang fluktuasi, hal

ini menunjukkan pola yang cukup mirip dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Di bandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2017, laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tercatat sebesar 5.46%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 5.07%. Hal tersebut mengalami peningkatan yang berlanjut pada tahun 2018 dan 2019, dengan laju pertumbuhan masing-masing 5.50% dan 5.53%, dibandingkan pada pertumbuhan ekonomi nasional 5.17% dan 5.02%, tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan. Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mengalami penurunan sebesar -2.33%, sedikit lebih dalam dibandingkan nasional yang tercatat -2.07%. Pada tahun 2021, Jawa Timur dan Indonesia mulai menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan 3.56% dan 3.7%. Tren positif ini berlanjut hingga tahun 2022 dan 2023, dengan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 5.34% dan 4.95%, sedangkan nasional mencapai 5.31% dan 5.05%. Ini mengarahkan pada kesimpulan, Jawa Timur memegang kinerja ekonomi yang relatif baik daripada nasional. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tercatat sebesar 4%, dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa, dan menjadi urutan ke 3 setelah Provinsi DI Yogyakarta sebesar 4.45% dan disusul DKI Jakarta 4.19%. Sehingga jika hal ini dibiarkan suatu ketika dapat merubah posisi dan Provinsi Jawa Timur akan terus tergeserkan oleh Provinsi lain.

Ekonomi Jawa Timur memiliki peran yang signifikan dalam menopang perekonomian nasional. Hal ini terlihat dari kontribusinya pada tahun 2023 yang mencapai 14.38 persen terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) dari 38 Provinsi di Indonesia. Pada tingkat kontribusinya, Provinsi Jawa Timur berada pada peringkat ke 2 dalam tingkat nasional. Posisi Jawa Timur berada di posisi menengah atas, oleh karena itu posisinya bisa naik, tetapi bisa juga tergeser dan tergantikan jika tidak dijaga. Oleh sebab itu, Jawa Timur harus bisa menjaga

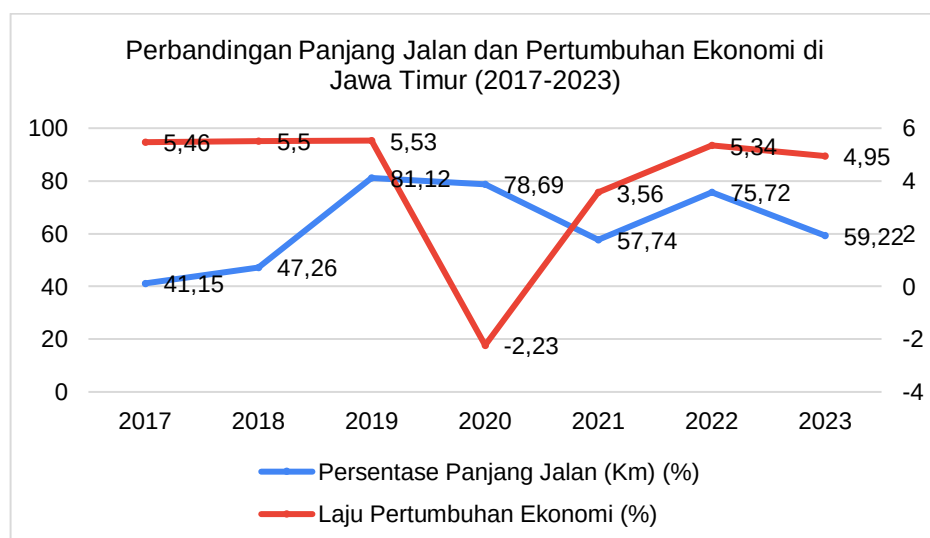
momentum pertumbuhan agar tidak tertinggal. Secara estimatif, berdasarkan proporsi Produk Domestik Bruto (PDB) dan laju pertumbuhan Jawa Timur menyumbang sekitar 14% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Struktur perekonomian Jawa Timur sebagian besar ditopang oleh sektor industri pengolahan yang menyumbang sebesar 30.54 persen, disusul oleh sektor perdagangan sebesar 18.91 persen, sektor pertanian dan perikanan sebesar 11.04 persen, serta sektor konstruksi sebesar 8.92 persen. Keempat sektor utama ini secara keseluruhan memberikan kontribusi sebesar 69.41 persen terhadap total PDRB Jawa Timur. Namun demikian, dominasi sektor industri dan perdagangan menuntut dukungan infrastruktur yang kuat dan distribusi investasi yang merata untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi (BPS Provinsi Jawa Timur, 2024). Tanpa dukungan tersebut, potensi sektor-sektor ini sulit dimaksimalkan, dan daya saing regional dapat menurun. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam variabel-variabel yang diduga memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, yaitu infrastruktur jalan, belanja modal, penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA).

Ekonomi Jawa Timur yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional tidak lepas dari peran strategis infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan, dalam menunjang aktivitas ekonomi wilayah. Dalam perspektif ekonomi makro, infrastruktur dipandang sebagai salah satu komponen penting yang mempengaruhi efisiensi distribusi barang dan jasa, mempercepat mobilitas tenaga kerja, serta menurunkan biaya transaksi dalam kegiatan produksi dan perdagangan. Menurut teori pertumbuhan endogen, infrastruktur seperti jalan dapat meningkatkan produktivitas, faktor-faktor produksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Infrastruktur ini tercermin dalam perekonomian Jawa Timur yang masih didominasi oleh sektor-sektor pada

logistik, seperti industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Kelancaran distribusi hasil produksi dari sektor-sektor tersebut sangat bergantung pada aksesibilitas dan kualitas infrastruktur jalan (Todaro & Smith, 2020).

Secara teoritis, peningkatan infrastruktur di suatu wilayah seharusnya berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena dapat memperlancar mobilitas barang dan jasa, mengurangi biaya distribusi, serta meningkatkan konektivitas antar wilayah. Namun, dalam praktiknya hubungan antara infrastruktur jalan dan pertumbuhan ekonomi tidak selalu menunjukkan pola yang konsisten. Di Provinsi Jawa Timur, peningkatan panjang jalan tidak diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil, bahkan cenderung fluktuatif dari tahun 2017 sampai tahun 2023. Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR Tahun 2021 menekankan bahwa indikator panjang jalan merupakan salah satu tolak ukur penting dalam menilai kualitas dan kapasitas pelayanan infrastruktur jalan. Panjang jalan, khususnya jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, digunakan untuk melihat tingkat keterhubungan dan aksesibilitas wilayah terhadap pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Jalan yang mampu menciptakan efisiensi waktu dan biaya transportasi, serta meningkatkan daya saing daerah (Kementerian PUPR, 2021). Pemilihan variabel panjang jalan dalam penelitian ini juga diperkuat oleh hasil studi empiris (Hadi et al., 2021). menunjukkan bahwa indeks infrastruktur jalan dihitung berdasarkan rasio panjang jalan terhadap luas wilayah dan jumlah penduduk berkorelasi positif dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB) dan bernilai negatif dengan tingkat kemiskinan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi ketersediaan jalan di suatu wilayah, semakin baik pula capaian ekonominya, serta berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan melalui peningkatan akses terhadap layanan dan peluang ekonomi.

Peningkatan persentase panjang jalan secara signifikan terjadi tahun 2019, mencapai 81.12%. Meskipun demikian, peningkatan tersebut tidak secara langsung diikuti oleh peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Bahkan, selama tahun 2020 pertumbuhan ekonomi tercatat mengalami penurunan sebesar -2.23% akibat dampak pandemi COVID-19, sementara persentase panjang jalan masih tergolong tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa perbaikan infrastruktur jalan membutuhkan waktu untuk memberikan efek terhadap peningkatan aktivitas ekonomi. Perubahan kondisi infrastruktur ini berpotensi mempengaruhi aktivitas ekonomi di Jawa Timur. Infrastruktur jalan yang baik dapat mendukung investasi publik dan swasta dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi distribusi barang serta jasa. Namun, jika terjadi penurunan kualitas infrastruktur, maka dapat berdampak pada kelancaran aktivitas ekonomi dan investasi. Kondisi infrastruktur jalan yang berfluktuasi ini dapat dikaitkan dengan realisasi belanja modal pemerintah daerah.

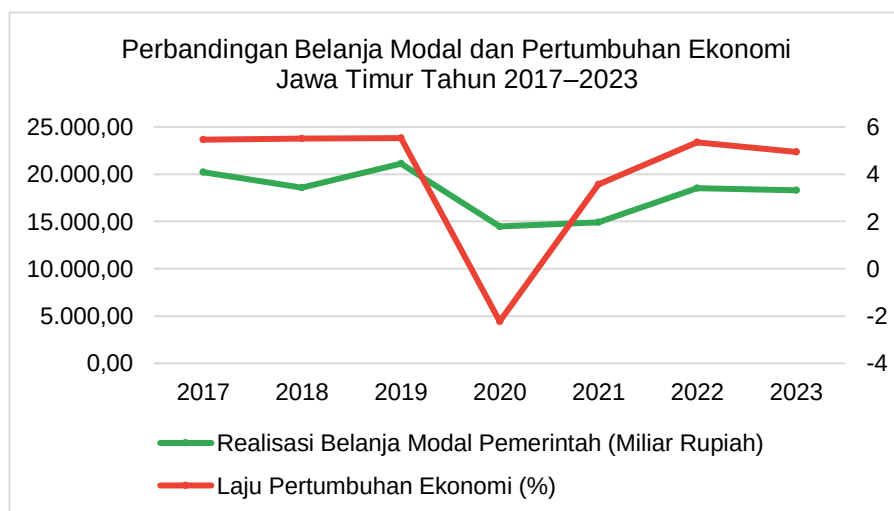


Gambar 1.2 Perbandingan Panjang Jalan dan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2023.

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur

Belanja modal merupakan bentuk intervensi fiskal pemerintah daerah yang dapat mendorong pertumbuhan melalui pembangunan aset produktif. Grafik tren investasi publik yang ditunjukkan melalui realisasi belanja modal pemerintah daerah Jawa Timur dari tahun 2017 hingga 2023 menggambarkan pola fluktuatif yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, modal belanja menunjukkan peningkatan yang moderat, diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang masih stabil. Namun pada tahun 2020, realisasi belanja modal justru mengalami peningkatan meskipun pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar -2.23 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan modal belanja tidak serta diikuti oleh perbaikan ekonomi, terutama ketika kondisi eksternal seperti pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Pemulihan mulai terlihat pada tahun 2021 hingga 2023, di mana realisasi belanja modal tetap berada pada level tinggi dan pertumbuhan ekonomi perlahan-lahan kembali positif.



Gambar 1.3 Perbandingan Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2023.

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Kondisi ini memperkuat pemahaman bahwa belanja modal memiliki peran penting dalam menstimulasi pemulihan ekonomi. meskipun efeknya bersifat jangka menengah. Belanja modal yang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, layanan dasar, dan penguatan sektor publik tampaknya mulai menunjukkan hasil dalam mendorong produktivitas dan aktivitas ekonomi daerah.

Oleh karena itu, penelitian ini diukur melalui indikator realisasi belanja modal pemerintah daerah, karena belanja modal merupakan bagian dari anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk pengadaan asset berjangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas publik lainnya. Indikator ini dipilih karena dianggap paling representatif dalam menggambarkan aktivitas investasi pemerintah yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kapasitas produksi dan efisiensi distribusi ekonomi. Pemilihan indikator ini didasarkan pada teori fiskal Keynesian, yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja modal melalui investasi publik dapat meningkatkan permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui efek multiplier, dan menciptakan asset tetap yang produktif (Richard, 1959). Dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019 mendefinisikan modal belanja sebagai belanja modal untuk asset berumur panjang dan sering digunakan dalam evaluasi efektivitas publik di daerah (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2019). Oleh karena itu, modal belanja digunakan sebagai indikator yang tepat, karena mencerminkan pengeluaran untuk membangun atau meningkatkan kapasitas infrastruktur dan asset produktif daerah.

Fluktuasi belanja modal ini mencerminkan dinamika kebijakan pemerintah dalam mendukung investasi infrastruktur yang berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi. Ketika belanja modal meningkat, kualitas infrastruktur cenderung

membaik dan dapat mendorong aktivitas ekonomi, sementara penurunan belanja modal berisiko menurunkan kualitas infrastruktur yang berdampak pada kelancaran distribusi barang dan jasa. Dengan tersedianya berbagai macam bentuk investasi baru ini maka tentu akan terbentuk penambahan output serta pendapatan baru dalam faktor produksi tersebut, hingga akan dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi.

Investasi terbagi menjadi dua, yakni investasi pemerintah serta investasi swasta. Investasi pemerintah dalam hal ini yakni penempatan sejumlah dana ataupun modal yang bersumber dari pemerintah. Sedangkan untuk investasi swasta sendiri yakni penempatan sejumlah dana ataupun modal yang bersumber dari suatu perusahaan swasta. Investasi swasta dibagi lagi menjadi dua bagian yang terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). PMDN merupakan penanaman modal yang keseluruhannya berasal dari dalam negeri dan ditanamkan dalam negeri. Sedangkan PMA kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh penanam modal asing dan mempunyai tujuan untuk dapat melakukan usaha diwilayah Negara Republik Indonesia. Penanaman modal dapat menggunakan modal asing seluruhnya ataupun bergabung dengan modal dalam negeri (Hermawan & Yunani, 2023).

Namun di Provinsi Jawa Timur keadaan investasi baik PMDN maupun PMA tidak merata keseluruh daerah dan banyak terpusat diwilayah perkotaan di Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut disebabkan karena investor memilih menanamkan modalnya didaerah tertentu seperti perkotaan karena fasilitas yang lebih mendukung seperti infrastruktur jalan yang baik yang akan melancarkan proses keluar masuknya bahan baku. Wilayah perkotaan yang berpotensi akan mendapatkan perhatian dan menarik para investor untuk menanamkan modalnya

di daerah tersebut sehingga akan dapat menciptakan barang produksi yang lebih banyak yang dapat membantu menambah pendapatan daerah. Sedangkan sebagian wilayah lain bahkan ada yang tidak mempunyai nilai investasi, apabila investasi disuatu daerah tidak berkembang, maka pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut kemungkinan besar akan tertinggal jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang dapat menarik perhatian investor (Meliani et al., 2021).

Secara teoritis, menurut pandangan teori pertumbuhan Harrod-Domar, pembentukan modal merupakan faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin besar akumulasi modal yang ditanamkan ke dalam kegiatan produktif, maka semakin tinggi tingkat output yang dapat dihasilkan. Oleh karena itu, PMDN dan PMA dipandang sebagai variabel penting dalam penelitian ini karena berkontribusi langsung terhadap pembentukan modal tetap dan peningkatan kapasitas produksi yang berdampak pada pertumbuhan PDRB. Dengan demikian, analisis terhadap pengaruh PMDN dan PMA menjadi relevan untuk memahami dinamika pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini, realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) merepresentasikan pembentukan modal tetap bruto dari sektor non publik, yang turut mendorong peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa (Nugroho & Hidayat, 2023).

Berdasarkan Tabel 1.1 hasil perkembangan realisasi investasi PMDN dan juga PMA di Provinsi Jawa Timur. Data menunjukkan bahwa selama periode 2017 hingga 2023, nilai PMDN dan PMA di Provinsi Jawa Timur mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. PMDN meningkat dari Rp45.04 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp74.93 triliun pada tahun 2023. Demikian pula, PMA meningkat dari Rp25.36 triliun menjadi Rp76.79 triliun pada periode yang sama.

Peningkatan ini menunjukkan adanya kepercayaan dari pelaku usaha terhadap iklim usaha di Jawa Timur, serta potensi ekonomi daerah yang menjanjikan.

Tingginya nilai realisasi investasi baik PMDN dan PMA yang cenderung mengalami laju naik turun itu bukan berarti aktivitas pembangunan ekonomi yang ada di Provinsi Jawa Timur berjalan secara lambat maupun cepat, sebab yang utama dari adanya investasi adalah bagaimana jumlah nilai uang serta proyek itu dapat mendorong suatu bentuk aktivitas ekonomi yang ada dengan cara yang efektif, efisien, dan juga tepat pada sasaran realisasi proyeknya.

Tabel 1.1 Perkembangan Realisasi PMDN dan PMA di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2023 (Triliun)

Tahun	PMDN	PMA
2017	45.044.540.000.000	25.368.443.400.000
2018	33.333.130.000.000	21.594.759.860.000
2019	45.452.714.000.000	14.028.960.000.000
2020	55.660.575.000.000	25.529.446.760.000
2021	52.552.239.000.000	29.956.595.120.000
2022	65.355.949.000.000	50.768.299.840.000
2023	74.937.358.000.000	76.797.844.840.000

Sumber : Kementerian Investasi dan Hilirisasi

Seperti yang telah diketahui bahwasanya investasi mempunyai peranan yang penting dalam sebuah pembangunan. Investasi akan mampu untuk mendorong berkembangnya sistem ekonomi, penambahan produktivitas, dan juga pendapatan guna menopang aktivitas pembangunan itu sendiri (Setijawan et al., 2021). Terdapat beberapa sektor unggulan PMDN dan PMA di Provinsi Jawa Timur yang sebagian besar di daerah perkotaan seperti Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, dan juga Kabupaten Probolinggo dan beberapa lokasi yang lain meliputi sektor

transportasi, gudang dan telekomunikasi, sektor perumahan, industri dan perkantoran, serta industri makanan dan minuman (Simeon et al., 2022).

Studi yang dilakukan oleh Nugroho & Hidayat. (2023) dengan judul "*Pengaruh Infrastruktur. Investasi Publik. dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Timur*", juga menunjukkan hasil yang relevan dengan konteks penelitian ini. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis analisis data panel pada 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur selama periode 2017–2023, hasil penelitian ini menunjukkan infrastruktur jalan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun infrastruktur jalan merupakan faktor penting dalam konektivitas dan mobilitas, dalam kasus Kalimantan Timur, peningkatan belanja infrastruktur jalan belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara efektif. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh alokasi anggaran yang kurang optimal, pembangunan yang tidak merata, atau kualitas infrastruktur yang belum memenuhi standar yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas ekonomi.

Sebaliknya, investasi publik terbukti memiliki pengaruh positif mengenai pertumbuhan ekonomi, yang menunjukkan alokasi anggaran pemerintah yang digunakan untuk membangun fasilitas umum. layanan publik, dan proyek infrastruktur lainnya berkontribusi langsung terhadap peningkatan PDRB. Hasil ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menekankan pentingnya investasi publik dalam menciptakan *multiplier effect* terhadap perekonomian daerah. Sementara itu. investasi swasta tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur, yang mengindikasikan bahwa meskipun ada investasi dari sektor swasta, dampaknya belum cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara nyata. Faktor-faktor seperti belum

optimalnya sinergi antara investasi swasta dan kebijakan pemerintah, keterbatasan infrastruktur pendukung. atau sektor-sektor yang menerima investasi belum memiliki daya dorong yang cukup besar terhadap PDRB, kemungkinan menjadi penyebabnya.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa investasi publik menjadi faktor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara infrastruktur jalan yang belum optimal justru memberikan dampak negatif. Temuan ini memberikan wawasan bagi pemangku kebijakan untuk lebih memperhatikan efektivitas pembangunan infrastruktur serta meningkatkan strategi dalam menarik dan mengelola investasi swasta agar lebih berdampak pada pertumbuhan ekonomi wilayah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana **“Pengaruh infrastruktur Jalan. Belanja Modal. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur pada periode 2017–2023.”** Dengan memahami hubungan antara faktor-faktor tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh infastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2023?
2. Bagaimana pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2023?

3. Bagaimana pengaruh penanaman modal dalam negeri (PMDN) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2023?
4. Bagaimana pengaruh penanaman modal asing (PMA) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur 2017-2023?
5. Bagaimana pengaruh infrastruktur jalan, belanja modal, penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA), terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. dengan fokus pada hal-hal berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa timur tahun 2017-2023.
2. Untuk menganalisis pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2023.
3. Untuk menganalisis pengaruh penanaman modal dalam negeri (PMDN) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2023.
4. Untuk menganalisis pengaruh penanaman modal asing (PMA) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2023.
5. Untuk menganalisis pengaruh infrastruktur jalan, belanja modal, penanaman modal dalam negeri (PMDN), dan penanaman modal asing (PMA) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Studi penelitian ini disusun karena ingin memperoleh manfaat akademis dan manfaat praktis. sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sebagai bentuk sarana untuk pengembangan literatur pada kajian ilmu ekonomi khususnya terkait kemiskinan dan selain itu juga berkontribusi untuk membantu peneliti maupun akademisi memahami bagaimana variabel-variabel ekonomi seperti infrastruktur jalan, belanja modal, PMDN dan PMA di Provinsi Jawa Timur.

2. Manfaat Praktis

Literatur ini dimaksudkan untuk dapat menyajikan informasi empiris bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi pembangunan yang lebih efektif. Dengan memahami bagaimana infrastruktur jalan, belanja modal, PMDN dan PMA berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, pemerintah dapat merancang peraturan yang lebih sesuai sasaran dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.